

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Akuntansi Syariah



Oleh :

WAGE SURATMAN

NIM : 503180120

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wage Suratman
NIM : 503180113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016-2020” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi,

Pembuat pernyataan



WAGE SURATMAN
503180113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Jambi

Pembimbing I : Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
Pembimbing II : Yuliana Safitri, S.Si., M.Si
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi
36122 Website : <http://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wage Suratman NIM: 503180120 yang berjudul:

“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016-2020” telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu(S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikiaan nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih.

Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
NIP. 19790902 200710 2 001

Dosen Pembimbing II



Yuliana Safitri, S.Si., M.Si
NIDN. 2026079401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-88 /D.V/PP.00.9/042022

Skripsi dengan judul "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 2020

yang disusun oleh:

Nama : Wage Suratman
NIM : 503180120
Tanggal ujian skripsi : 03 April 2023
Nilai munaqasyah : 82,75 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Penguji
Ketua Sidang,

Dr. Addiarrahman, M.S.
NIP. 19860106 201503 1 002

Penguji I,

Ahmad Syahrizal, M.E.
NIP. 19920814 201903 1 012
002

Penguji II,

Firman Syah Noor, M.M.
NIP. 19790914 201411 1

Pembimbing I,

Dr. Elyanti Rosmanidar, M.S.
NIP. 19790902 200710 2 001

Pembimbing II,

Yuliana Safitri, M.Si
NIDN. 2026079401

Sekretaris Sidang,

Ferry Saputra Tanjung, M.Ak
NIDN. 2007099401

Jambi, April 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan,

Dr. A.A. Miftah, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.”

(Q.S Al-Hujarah 49:15)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

¹ Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs.Al-Hujarah 49: 15 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995).”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda Muridan dan Ibunda Darma Tapsiah tercinta, yang telah mengorbankan hidupnya, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan berupa moril dan materi. Bahkan memanjatkan doa-doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan air mata bagi saya. Terima kasih yang tiada hentinya atas segala dukungan kalian yang takkan pernah tergantikan.

Terima kasih juga kepada keluarga besar atas dukungan sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit dengan sabar dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini. Tak ada tempat berkeluh kesah selain bersama orang-orang yang selalu mendengarkan, memberikan solusi dan selalu berada di garis terdepan yaitu Asrita Rahayu Utari Serta Sahabat seperjuangan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya teman-teman kelas D yang selalu memberikan informasi dan bantuan lainnya kurang lebih 3-4 tahun selama masa pendidikan.

Terima kasih juga untuk Pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) baik dari rayon Febi, maupun di Komisariat Uin Sts Jambi, selama menempuh di bangku perkuliahan, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah didapatkan yang tidak diajarkan didalam kelas.

Tak lupa pula terima kasih kepada tim KKN-kel 104 2021 dimana selama kkn pelajaran hidup ditengah masyarakat dijalankan secara bersama-sama. Masih banyak wadah organisasi yang telah membuat saya berkembang serta banyak belajar dan terus belajar. Serta terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Teruslah menggapai impian

dan jangan berhenti. Terus belajar, berusaha sertakan doa untuk menggapainya. Hanya sebuah karya kecil dan untaian katakata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, ribuan terima kasih kuucapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk. variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data data primer dan data sekunder data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu badan perencanaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sarolangun, dan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Kabupaten Sarolangun dan data sekunder yaitu laporan realisasi pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan data statistik. Tahun 2016 digunakan untuk membandingkan pada tahun 2017 hingga 2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode statistik menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan uji F didapatkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Kata kunci : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This thesis aims to determine the effect of motor vehicle tax contributions, motor vehicle transfer fees and the number of residents on the local revenue of Sarolangun Regency in 2016-2020. This study uses independent variables, namely the contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fees and population. the dependent variable is local revenue. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data in this study were obtained directly from the research location, namely the regional financial and asset planning agency for Sarolangun Regency, and the one-roof administrative system (samsat) for Sarolangun Regency. and secondary data, namely reports on the realization of local own-source revenues, motorized vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles, and statistical data. 2016 is used to compare 2017 to 2020. This research is quantitative. Statistical methods using multiple linear regression analysis, t test, f test, and analysis of the coefficient of determination. The results of this study indicate that the contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fee and total population have no effect on local revenue. By using the F test it was found that the independent variables did not have a simultaneous effect on the dependent variable.

Keywords : *Motorized Vehicle Tax Contribution, Motorized Vehicle Transfer Fee, Total Population and Regional Original Income.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi berjudul "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020". disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat terselesaikan dengan lancar. Kemudian dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
2. Yuliana Safitri, S.Si., M.Si
3. Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN STS Jambi
4. Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
5. Dr. Rafidah, SE., M.EI, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
6. Titin Agustin N, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Dr. Addiarahman, M.SI Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

8. Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I. dan Bapak Erwin Saputra Siregar, M.E. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
9. Bapak dan Ibu Dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
10. Teman-teman lokal D Akuntansi Syariah angkatan 2018.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunanNya, dan kepada manusia kita memohon kemaafan nya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistemika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Pustaka	11
B. Studi Relevan	27
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian dan jenis penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data.....	34
C. Populasi dan Sampel	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
E.	Definisi Operasional Variabel.....	36
F.	Metode Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B.	Hasil Penelitian	53
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	63
B.	Implikasi	64
C.	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.....	3
Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB).....	4
Tabel 1. 3 Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020	5
Tabel 2. 1 Studi Relevan	27
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Parsial	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan.....	58
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linear Berganda	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4. 1 Lambang Daerah Sarolangun :	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia selaku negara berkembang saat ini sedang giat melakukan pembangunan-pembangunan disegala bidang dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena pesatnya pembangunan yang dilakukan Indonesia saat ini tentu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh begitu banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga meningkatkan gaya hidup masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Ini dapat dibuktikan dengan tingginya konsumsi masyarakat terhadap barang-barang produksi, seperti peralatan elektronik dan kendaraan.

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyongkong pembangunan daerah dan merupakan pemasukan yang potensial karena terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Salah satu fungsi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi. Pemerintah pusat sebagai lembaga ekonomi akan melakukan pengeluaran berbagai macam biaya untuk semua kegiatan operasional, sedangkan pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1)), bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²

Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD sangat tergantung bagaimana suatu daerah bisa mengembangkan dan menggali potensi daerah mereka sendiri, supaya PAD tersebut bisa memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan serta belanja suatu daerah. sumber-sumber PAD dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 perihal otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang dan keleluasan pemerintah daerah dalam melaksanakan, menjalankan otonomi daerahnya, pengelolaan dan pengembangan aneka macam sumber daya yang mampu dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah. untuk itu, perolehan tersebut diharapkan sebagai sumber pembiayaan serta penyelenggaraan yang menunjuk pada meningkatkan Pendapatan asli daerah untuk pembangunan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak dalam mengelola sumber daya yang dimiliki pada daerahnya tersebut supaya menghasilkan penerimaan bagi daerahnya yaitu dengan mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat.³

²“Sirajuddin dkk, ‘Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, 2016’.”

³“Mustika, Sari Tri. 2013. ”Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Perkembangan
2016	92.425.177.747	7,77
2017	118.185.129.614	27,87
2018	98.828.593.872	-16,37
2019	94.621.365.981	-4,26
2020	70.098.806.983	-25,92
Rata-rata		-2,182

Sumber : BPKAD Kab. Sarolangun, data diolah

Pada tabel 1.1 gambaran PAD yang diperoleh Kabupaten Sarolangun menunjukkan kondisi yang tidak stabil yakni mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 27,87, Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -4,26 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar -25,92. Maka dari itu pendapatan asli daerah kabupaten Sarolangun pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi atau tidak stabil.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang semakin tinggi membuat pemerintah daerah menariskan jumlah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang ditariskan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan PAD. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah tahun 2018-2020.⁴

Tabel 1. 2

Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis penerimaan (%) PAD				
	PAD	PKB	%	BBNKB	%
2016	92.425.177.747	9.561.781.700	11,46	77.065.900	0,09
2017	118.185.129.614	14.651.516.050	17,20	181.116.800	0,21
2018	98.828.593.872	14.977.606.400	15,16	112.114.200	0,11
2019	94.621.365.981	16.058.929.400	16,97	69.307.700	0,07
2020	70.098.806.983	17.714.741.650	25,27	15.118.000	0,02
Rata-rata	94.831.814.839	14.592.915.040	17,21	90.958.520	0,1

Sumber : SAMSAT Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 11,46%, tahun 2017 meningkat sebesar 17,20%, tahun 2018 menurun sebesar 15,16%, tahun 2019 meningkat kembali sebesar 16,97% an tahun 2020 meningkat kembali sebesar 25,27%. Sedangkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sebesar 0,09%, tahun 2017 meningkat sebesar 0,21%, tahun 2018 menurun sebesar 0,11%, tahun 2019 menurun kembali

⁴ Desti Rinika, Fitri Yani Panggabean. 2014. "Kontribusi pajak kendaraan berm."

sebesar 0,07% dan tahun 2020 menurun kembali sebesar 0,02%. Maka dari itu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020 mengalami fluktuai atau tidak stabil. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Kabupaten Sarolangun maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal.

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicadangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.⁵

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	284.201
2017	290.231
2018	295.985
2019	301.908
2020	307.585
Rata-rata	295.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun

⁵ Asmuruf, "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah penduduk 284.201 jiwa dan tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 307.585 jiwa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya juga membuat konsumsi kendaraan semakin meningkat maka diharapkan penerimaan PAD, PKB, dan BBNKB mengalami peningkatan.

Berbagai penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain penelitian dari Ruslinda Agustina, Rina Arliani (2015) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012 menunjukkan pengujian hipotesis secara simultan atau uji f PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi kalimantan selatan periode 2003-2012. Sedangkan Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni (2021) yang meneliti tentang Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur tahun 2013 – 2019 menunjukkan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode waktu yang di gunakan, penambahan variabel independen dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dan hasil yang masih belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan menandakan pemerintah belum efisien dalam mengelola anggaran.
2. Terjadinya fluktuasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menandakan kurang taatnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Terjadinya penurunan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menandakan pembelian kendaraan bermotor mengalami penurunan.
4. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk tetapi PAD mengalami penurunan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan persepsi serta fokus penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini seberapa besar pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun?



4. Apakah Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk mengetahui jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.
4. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Bagi Peneliti
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah dan bagi pemerintah bahan acuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk.
3. Manfaat akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan civitas akademika dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistemika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyusun sistemika penulisan yang terdiri dari Lima Bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan manfaat penelitian, serta sistemika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Bab ini menjelaskan kerangka teori, teori hubungan antar variabel, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode yang di gunakan dalam penelitian ini yang meliputi objek penelitian, jenis

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel dari penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti oleh peneliti mengenai pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penutup

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae peneliti.

BAB IV

BAB V



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atau desentralisasi.⁶

Menurut Widjaja pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).⁷

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 15 tahun 2003 tentang “pendapatan daerah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.⁸

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

⁶ Yani, “Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.”

⁷ “A.W. Widjaja, otonomi daerah dan daerah otonom,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h.32,”

⁸ “Undang-Undang No. 17 pasal 1 butir 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Daerah, Bab V pasal 6 menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a) Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b) Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeternya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.⁹

c. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.¹⁰

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber - sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW yaitu zakat, kharaj, khums, ghonimah dan fa'i, jizyah.

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah , yaitu denda

⁹ "Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah."

¹⁰ Nurul, "dkk. Keuangan Publik Islam."

misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara. Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu Sukuk.¹¹

2. Pajak Daerah

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹² Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹³

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

¹¹ “Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3 (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.266,” 266.

¹² “Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1,” 1.

¹³ “Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta:Salemba Empat, 2005) h.2,” 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Dasar hukum pajak daerah adalah Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

3. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

¹⁴ “Mardiasmo, perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2011) h. 1,”

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹⁵

¹⁵ “Mardiasmo, perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2011) h.3”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
 J A M B I

4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu:

a. *Official Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri nya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹⁶

5. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. UU Nomor 34 tahun 2000 merupakan perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁶ Rizal dan Hidayah, “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.”

wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, STPD, surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.¹⁷

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat

¹⁷ Agustina dan Arliani, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012."

secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).

5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Objek pajak BBNKB adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau sepihak, pemasukan dari luar negeri untuk dipakai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan kebadan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan.¹⁸

b. Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

7. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.¹⁹

Revered Thomas Maltus pada tahun 1798 mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuan menurut deret ukur yaitu dua

¹⁸ Agustina dan Arliani.

¹⁹ “Badan Pusat Statistik. 2016. Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun 2016-2020.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksitanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.²⁰

Menurut Irhamni dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk memmbuat konsusmsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktivitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

²⁰ Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.²¹

8. Pajak Menurut Perspektif Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan dan membebaskan.²² Secara bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan dan pos- pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.²³

Pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan persetujuan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharabah bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan Baitu Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya besar jika hal itu tidak dilakukan. Dari 74499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Quran hanya satu kali saja kata “Pajak” ada dalam terjemahan Alqur’an yaitu

²¹ Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi Keempat)*. Yogyakarta : Mediakom.

²² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012) h. 830, 830.

²³ Abdul Qadim Zallun, *Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmu Lialayin, Cet II, 1408 H/ 1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S. dkk, Sistem Keuangan di Negara Syariah*, (Bogor: Pustaka Thariq Izzah ,2002), h.138, 138.

pada surah At-Taubah Ayat ke 29. Pada ayat itu kata “jizyah” diterjemahkan dengan ”pajak”.²⁴

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu- individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sesuai dengan firman Allah Swt Berikut:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

²⁴ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Q.s At-Taubah : 29, 29.

²⁵ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs. An-nisa (4) ; 59 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 990, 990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu diimbangi dengan peningkatan prasarana publik karena sifat barang public yang *non-rivalry* ialah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga menikmati barang public tersebut dan *non-exclusion* yang berarti apabila barang public itu tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang public tersebut. maka masing masing individu akan cenderung *free rider* adalah istilah untuk mereka yang ikut menikmati barang public tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya jalan raya adalah salah satu barang public, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut (*Non-Rivalry*) Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya. dan sebagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan untuk perbaikan jalan raya, orang yang dapat menikmati jalan tersebut tidak hanya yang bayar saja, tetapi yang tidak bayar pajak juga dapat menikmatinya (*Non-Excludable*) tanpa mengeluarkan kontribusi didalamnya (*Free Rider*).

B. Teori Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Terutama untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Fungsi dari PKB yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum di dalam suatu daerah. Termasuk untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat. Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang baik adalah membayar Pajak Kendaraan Bermotor.²⁶

2. Hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mencapai pembangunan daerah yang baik, selain membayar Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai belanja daerah. Dimana hanya dalam waktu 11 hari saja ribuan kendaraan telah terjual dan siap ikut memenuhi jalanan yang ada di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka akan berdampak pada meningkatnya penghasilan daerah yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).²⁷

3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita over population, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin. Namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil

²⁶ Simanjuntak, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 6 Kota Di Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016."

²⁷ Simanjuntak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang diterima oleh setiap orangpun menjadi kecil.²⁸ Oleh karena itu jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu

C. Studi Relevan

Adapun berbagai studi relevan yang peneliti jadikan acuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Studi Relevan

No	Pengarang	Judul penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ruslinda Agustina, Rina Arliana / 2015 ²⁹	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Beaa Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji f PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi kalimantan selatan periode 2003-2012. hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang

²⁸ Rosyidi, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro."

²⁹ Agustina dan Arliani, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012."

				ada pada model regresi mampu menjelaskan 64% terhadap pad dan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2	Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie/ 2016 ³⁰	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota banjarmasin, hal ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t table. sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak

³⁰ Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie/ 2016 "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ppju dan pajak parkir.
3	Deden Edwar Yokeu Bernardin / 2017 ³¹	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Regresi Linier Sederhana	Berdasarkan hasil uji spps versi 23 pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 0,972. dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05 menunjukkan bahwa pajak kendaraan

³¹ Deden Edwar Yokeu Bernardin / 2017 "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang signifikan. maka pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. dari hasil di atas menunjukkan bahwa sebesar 0,972 PAD dipengaruhi oleh variansi dari variabel independen yang digunakan, sedangkan sisanya sebesar 0,028% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4	Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni/2021 ³²	Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur tahun 2013 – 2019	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini adalah variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
5	Siti Hayati / 2018 ³³	Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor	Regresi Linier Berganda	Pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan variabel bea balik nama kendaraan

³²“Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni/2021 Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur tahun 2013 – 2019.”

³³“Siti Hayati / 2018 Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (pad) menurut perspektif ekonomi islam di provinsi lampung tahun 2011-2016.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

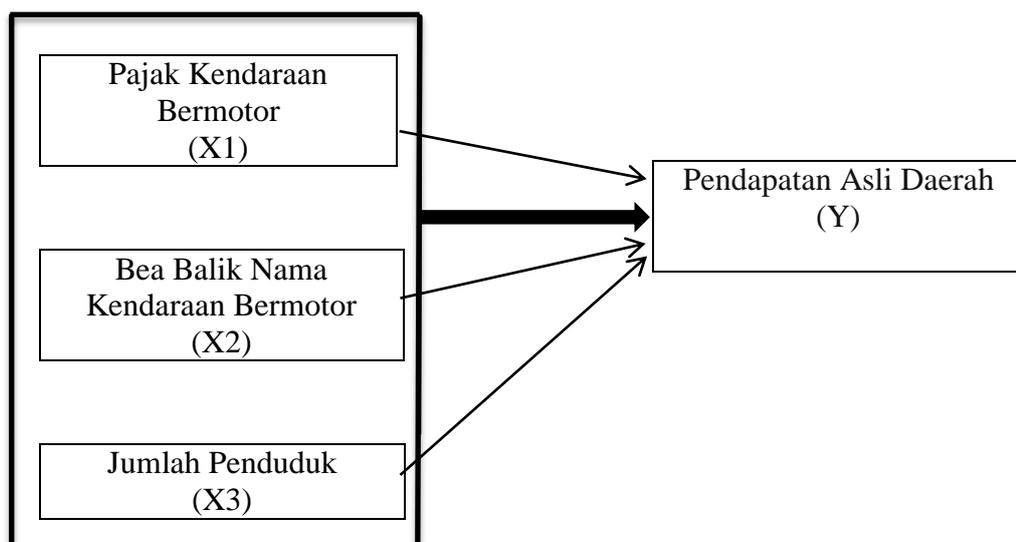
	terhadap pendapatan asli daerah (pad) menurut perspektif ekonomi islam di provinsi lampung tahun 2011-2016.		bemotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
--	---	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode waktu yang digunakan, penambahan variabel independen, dan objek penelitian.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Keterangan :

→ Pengaruh secara parsial

➔ Pengaruh secara simultan

Pada gambar 2.1 Secara parsial masing-masing variabel X akan mempengaruhi variabel Y. Variabel pajak kendaraan bermotor (X1) merupakan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y). Variabel bea balik nama kendaraan bermotor (X2) akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y). Variabel Jumlah Penduduk (X3) akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y). Secara simultan, variabel X1, X2 dan X3 akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Y).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti kurang dari tesa yang berarti pendapat. Jadi, Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah :

Ha1 : Pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun.

Ha2 : Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun.

Ha3 : Jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun.

Ha4 : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kabupaten sarolangun dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁴

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Kabupaten sarolangun. Hal-hal yang berhubungan dengan data kendaraan bermotor dan pemungutan pajak

³⁴ “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.”

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Sarolangun.

2. Data Sekunder, adalah data yang sudah diolah dan telah menjadi dokumentasi suatu perusahaan. Contohnya : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Keendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Data statistik.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi (*population*) adalah jumlah dari keseluruhan objek (mengacu pada keseluruhan kelompok orang; kejadian; atau hal minat) yang ingin peneliti investigasi.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu PAD kabupaten Sarolangun yang diambil menjadi sampel yaitu 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel.³⁶

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.³⁷ Dalam penentuan menggunakan *Purposive Sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti, beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), data jumlah penduduk dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun

³⁵ Uma Sekaran, *Research Methods For Business* (Jakarta : Salemba Empat, 2006).

³⁶ Uma Sekaran, *Research Methods For Business* (Jakarta : Salemba Empat, 2006).

³⁷ Dr, "Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), Hlm 85."

terakhir (tahun 2016-2020). Dalam hal ini penulis menggunakan sampel tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan yang lainnya.³⁸ Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), data jumlah penduduk dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016-2020.

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel ialah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam sebuah penelitian umumnya ada dua variabel yaitu variabel bebas (*Independence Variabel*) dan Variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah.

a. Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan

³⁸ Jusuf, "Pengantar Metodologi Penelitian."



otonomi daerah sebagai perwujudan atau desentralisasi. Adapun untuk perhitungannya yaitu:³⁹

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jumlah penduduk.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.⁴⁰

Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{PKB Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{PKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai

³⁹ Pratiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal."

⁴⁰ Agustina dan Arliani, "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012."

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.⁴¹

PBBN-KB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Tarif

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicadangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

$$P_t = (L - M) + (I - E)$$

Keterangan:

P_t : Pertumbuhan penduduk total

L : Angka kelahiran dalam satu tahun

M : Angka kematian dalam satu tahun

I : Penduduk yang masuk (imigrasi)

E : Penduduk yang keluar (emigrasi)

⁴¹ Agustina dan Arliani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3. 1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian Variabel	Indicator	Skala
Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	Pajak Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suau sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.	$PKB \text{ Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$	Rasio
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

(X2)	penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.	$PBBN-KB = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$	Rasio
Jumlah Penduduk (X3)	Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan.	$P_t = (L - M) + (I - E)$	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atau desentralisasi	$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$	Rasio
----------------------------	---	--	-------

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.⁴² Persamaan dasar regresi linear berganda secara umum adalah sebagai berikut :

⁴² Matondang dan Nasution, *Praktik Analisis Data*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Pendapatan Asli Daerah
 α = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi
 β_2 = Koefisien Regresi
 β_3 = Koefisien Regresi
 X_1 = Pajak Kendaraan Bermotor
 X_2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 X_3 = Jumlah Penduduk
e = Error Term

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup : Uji Normalitas, Uji Multikolineritas dan uji Heteroskedastisitas, uji Autokolerasi.⁴³

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Output eviews menyatakan bahwa nilai *Jarque Bera Test* (>2), maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian nilai *Probability* (>5%) sehingga dapat diartikan bahwa data

⁴³ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

berdistribusi normal.⁴⁴ Adapun langkah-langkah pengujian dengan eviews: Buka eviews kemudian lakukan olah regresi, dari menu *equation*, klik *view/ residual test/ histogram-normality test*.⁴⁵

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahu 1934. Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. *Output* Eviews meyakinkan apabila variabel independe (X) memiliki koefisien ($<0,85$) maka tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.⁴⁶

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* atau pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah:

- a. Uji White
- b. Uji Park
- c. Uji Glajser

⁴⁴ Matondang dan Nasution, Praktik Analisis Data.

⁴⁵ Matondang dan Nasution.

⁴⁶ Matondang dan Nasution.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hasil Eviews menyatakan apabila nilai *Prob. Chi-Square* sebesar (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.⁴⁷

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap terikat.⁴⁸

Adapun langkah langkah uji hipotesis dengan menggunakan eviews adalah sebagai berikut:

1. Inputlah data terlebih dahulu dalam program excel
2. Buka program eviews
3. Klik *file/open/eviews workfile/import*lah data excel anda
4. Klik *Quick/ estimate equation*
5. Masukkan rumus persamaan regresi anda ($y = c + x_1 + x_2$) kemudian klik Ok.

b. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

⁴⁷ Matondang dan Nasution.

⁴⁸ Matondang dan Nasution.

- a). Jika nilai $\text{Sig} < a$ maka H_0 ditolak
- b). Jika nilai $\text{Sig} > a$ maka H_0 diterima.

c. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai a (5 %) pada tingkat derajat 5 %. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig a (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $\text{Sig} < a$ maka H_0 ditolak
- b. Jika nilai $\text{Sig} > a$ maka H_0 diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Sarolangun

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis patrol Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi ilir (Timur) dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jambi dengan Bupatinya pada masa itu adalah M. Kamil. Pada tahun 1950 sampai Jambi menjadi Propinsi tahun 1957, Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan Ibukotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai Emas Bangko. Sejak saat itu, Kota Sarolangun menjadi Kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dengan ibukotanya Bangko. Melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun resmi terbentuk.

Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor : 2/DPRD/99 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Bupati Pertama 1999 – 2001 adalah H. Muhammad Madel (Care Taker). Kemudian berdasarkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 terpilih Bupati dan Wakil Bupati H. Muhammad

Madel, dan H. Maryadi Syarif. Saat ini setelah dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada bulan Juli 2006 yang merupakan pemilu lansung pertama bagi Kabupaten Sarolangun maka terpilihlah H. Hasan Basri Agus dan H. Cek Endra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih periode 2006 – 2011. Berdasarkan Hasil Pemilukada Tahun 2011 maka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 – 2016 adalah H. Cek Endra dan Pahrul Rozi. Dan melalui pemilihan secara langsung, H. Cek Endra kembali terpilih sebagai Bupati untuk periode 2017 – 2022 berpasangan dengan H. Hilalatil Badri Sebagai Wakil Bupati.

Dalam rangka melengkapi kelembagaan pemerintahan dan birokrasi publik dan sebagai Kabupaten Pemekaran, maka lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun DPRD pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DPRD Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko). Pemisahan lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.

Pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 107 Desa, 4 Kelurahan dan 2 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi dan saat ini tahun 2021 sudah menjadi 10 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 Desa.

Gambar 4. 1
Lambang Daerah Sarolangun :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada gambar 4.1 merupakan lambang Kabupaten Sarolangun berbentuk persegi lima berwarna merah, dasar warna biru, dasar warna hijau berbukit-bukit, kubah masjid dan lima pintu masjid, tiga tingkat bangunan dibawah pucuk masjid berwarna putih, jembatan dua sebandung, empat ruas jembatan gantung, lima ruas jembatan lintas, kapas warna hitam berjumlah dua belas tangkai sepuluh gelung, tali warna coklat tua, padi warna kuning emas kiri dan kanan berjumlah sembilan butir, warna Orange, warna kuning, balai adat, warna hitam balai adat, satu pintu dan dua jendela, enam ruas pintu tengah balai adat, dua belas takah tangga berwarna putih, sebuah keris lekuk sembilan warna kuning emass, sebuah gong, dan warna coklat muda dinding rumah.

Tabel 4. 1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
15.03.01	Batang Asai	0	23	Desa	Batin Pengambang Batu Empang Bukit Berantai Bukit Kalimau Ulu Bukit Sulah Datuk Nan Duo Kasiro Kasiro Hilir Lubuk Bangkar Muara Cuban Muaro Air Dua Muaro Pemuat Padang Jering Paniban Baru Pekan Gedang Pulau Salak Baru Raden Anom Rantau Panjang Simpang Narso Sungai Baung Sungai Bemban Sungai Keradak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hok Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Tambak Ratu
15.03.02	Limun	0	16	Desa	Berkun Demang Lubuk Bedorong Meribung Mersip Moenti Muara Limun Muara Mansao Napal Melintang Panca Karya Pulau Pandan Ranggo Suka Damai Tanjung Raden Temalang Temenggung
15.03.03	Sarolangun	6	10	Desa	Baru Bernai Bernai Dalam Ladang Panjang Lidung Panti Sungai Abang Sungai Baung Tinting Ujung Tanjung
15.03.03	Sarolangun	6	10	Kelurahan	Aur Gading Dusun Sarolangun Gunung Kembang Pasar Sarolangun Sarolangun Kembang Sukasari
15.03.04	Pauh	1	13	Desa	Batu Ampar Batu Kucing Danau Serdang Karang Mendapo Kasang Melintang Lamban Sigatal Lubuk Napal Pangidaran Pangkal Bulian Seko Besar

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Semaran Sepintun Taman Bandung
15.03.04	Pauh	1	13	Kelurahan	Pauh
15.03.05	Pelawan	0	14	Desa	Batu Putih Bukit Lubuk Sayak Lubuk Sepuh Mekarsari Muara Danau Pasar Pelawan Pelawan Pelawan Jaya Pematang Kolim Penegah Pulau Aro Rantau Tenang Sungai Merah
15.03.06	Mandiingin	0	28	Desa	Bukitperanginan Butang Baru Guruh Baru Gurun Baru Gurun Mudo Gurun Tuo Gurun Tuo Simpang Jati Baru Jati Baru Mudo Jernang Baru Kertopati Kute Jaye Mandainangin Tuo Mandiingin Mandiingin Pasar Meranti Baru Meranti Jaya Muaro Ketalo Pemusiran Petiduran Baru Rangkiling Rangkiling Simpang Simpang Kertopati Suka Maju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Sungai Butang Sungai Rotan Talang Serdang Taman Dewa
15.03.07	Air Hitam	0	9	Desa	Baru Bukit Suban Jernih Lubuk Jering Lubuk Kepayang Mentawak Baru Mentawak Ulu Pematang Kabau Semurung
15.03.08	Bathin VIII	1	14	Desa	Bangun Jayo Batu Penyabung Dusun Dalam Muaralati Penarun Pulaubuayo Pulaumelako Pulau Lintang Rantau Gedang Suka Jadi Tanjung Tanjunggagak Teluk Kecimbung Teluk Mancur
15.03.08	Bathin VIII	1	14	Kelurahan	Limbur Tembesi
15.03.09	Singkut	1	12	Desa	Argo Sari Bukitmurau Bukittigo Bukit Bumi Raya Bukit Talang Mas Pasar Singkut Payo Lebar Perdamaian Sendang Sari Siliwangi Simpang Nibung Sungaigedang
15.03.09	Singkut	1	12	Kelurahan	Sungaibenteng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
15.03.10	Cermin Nan Gedang	0	10	Desa	Kampung Tujuh Lubuk Resam Lubuk Resam Hilir Pemuncak Sekamis Sungaikeramat Tambang Tinggi Tendah Telukrendah Teluktigo
	TOTAL	9	149		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

2. VISI dan MISI Kabupaten Sarolangun

a. VISI Kabupaten Sarolangun

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2011 – 2016, adalah suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun lima tahun ke depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan kedua RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun (Tahun 2011 – 2016) adalah “SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

LEBIH MAJU artinya Meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah.

LEBIH SEJAHTERA artinya Terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

b. MISI Kabupaten Sarolangun

Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.

B. Hasil Penelitian

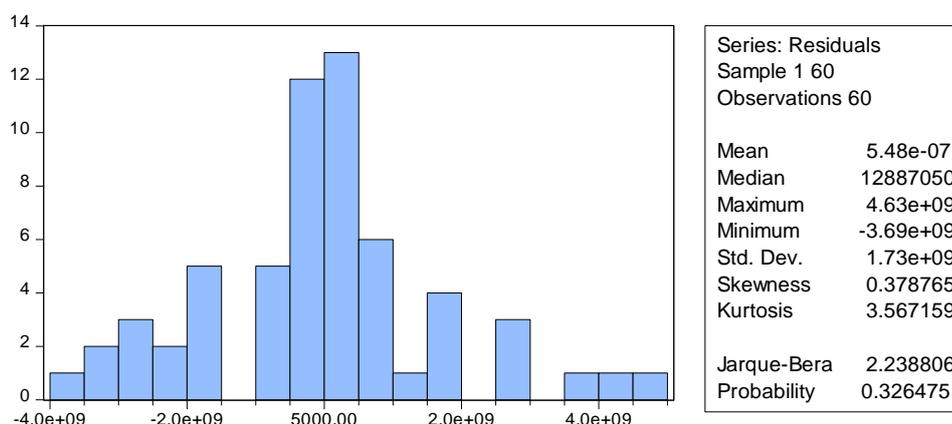
1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Output eviws menyatakan bahwa nilai *Jarque Bera Test* (>2), maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian nilai *Probability* ($>5\%$) sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.⁴⁹

Tabel 4. 2

Hasil Uji Normalitas



⁴⁹ Matondang dan Nasution, Praktik Analisis Data.



Berdasarkan gambar 4.2 Output views menyatakan bahwa nilai JB sebesar 2.238806 (>2), maka data berdistribusi secara normal. Kemudian nilai Prob. Sebesar 0.326475 ($>5\%$) sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. *Output* Eviews menyatakan apabila variabel independe (X) memiliki koefisien ($<0,85$) maka tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.⁵⁰

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

	PKB	BBNKB	Jumlah_Penduduk
PKB	1.000000	-0.215543	0.405688
BBNKB	-0.215543	1.000000	0.115232
Jumlah_Penduduk	0.405688	0.115232	1.000000

Dari hasil output diatas tampak bahwa variabel X1 (PKB), X2 (BBNKB) dan X3 (jumlah penduduk) memiliki koefesien -0.215543 dan -0.405688 (<0.85) maka tidak terdapat hubungan linier antara ketiga variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.

⁵⁰ Matondang dan Nasution.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* atau pengamatan yang lain.

Hasil Eviews menyatakan apabila nilai *Prob. Chi-Square* sebesar (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.⁵¹

Tabel 4. 4

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Least Squares
Date: 01/22/23 Time: 17:49
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.76E+09	5.13E+09	-1.123659	0.2660
PKB	0.668448	0.585145	1.142364	0.2582
BBNKB	0.361599	14.02910	0.025775	0.9795
JUMLAH_PENDUDUK	252.1124	221.4993	1.138208	0.2599
R-squared	0.077237	Mean dependent var		1.22E+09
Adjusted R-squared	0.027803	S.D. dependent var		1.22E+09
S.E. of regression	1.20E+09	Akaike info criterion		44.71341
Sum squared resid	8.06E+19	Schwarz criterion		44.85303
Log likelihood	-1337.402	Hannan-Quinn criter.		44.76802
F-statistic	1.562438	Durbin-Watson stat		1.634697
Prob(F-statistic)	0.208656			

Hasil eviews menyatakan bahwa nilai prob X1 sebesar 0.2582 (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas, pada X2 memperoleh nilai prob 0.9795 (>5%) maka data pada variabel X2 tidak mengandung heteroskedastisitas dan pada X3 memperoleh nilai prob 0.2599 (>5%) maka data pada variabel X3 tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan lolos uji.

⁵¹ Matondang dan Nasution.

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Hasil dari Koefisien Determinasi dapat dilihat melalui gambar berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: LOGPAD__Y_

Method: Least Squares

Date: 04/07/23 Time: 10:58

Sample: 1 60

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

Nilai Adjusted R- squared 0.1986 (19,86%) berarti variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor),X2 (pajak bea balik nama kendaraan bermotor) dan X3 (jumlah penduduk) mempengaruhi variabel Y (pendapatan asli daerah) sebesar 80,14% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Uji T (Uji Parsial)

Hasil uji T (Uji Parsial) dapat dilihat dari gambar berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Parsial

Dependent Variable: LOGPAD__Y_
Method: Least Squares
Date: 04/07/23 Time: 10:58
Sample: 1 60
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

Berdasarkan gambar 4.5 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah memiliki signifikan sebesar $0,0306 < 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,292727 < 2,000995378$. Maka dapat disimpulkan H_{a1} diterima. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh negative secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.
2. Pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah memiliki signifikan sebesar $0,6466 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,464079 < 2,000995378$. Maka dapat disimpulkan H_{a2} ditolak. Bea balik

nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

3. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah memiliki signifikan sebesar $0,0077 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,899648 > 2,000995378$. Maka dapat disimpulkan H_{a3} diterima. Jumlah penduduk berpengaruh positive secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

c. Uji F (Uji Simultan)

Hasil uji F (Uji Simultan) dapat dilihat dari gambar berikut :

Tabel 4. 7

Hasil Uji Simultan

Dependent Variable: LOGPAD__Y_
Method: Least Squares
Date: 04/07/23 Time: 10:58
Sample: 1 60
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai prob (F-statistic) sebesar 0,036228 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Kemudian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,314132 > 2,76076704$ artinya H_a diterima dan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah

penduduk secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positive terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

d. Regresi Linear Berganda

Hasil dari Regresi Linier Berganda dapat dilihat melalui gambar berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOGPAD__Y_
Method: Least Squares
Date: 04/07/23 Time: 10:58
Sample: 1 60
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = (-34,45) - 0,6166x_1 - 0,02436x_2 + 4,1434x_3 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -34,45, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -34,45
- Koefisien regresi pajak kendaraan bermotor (X1) yang dihasilkan sebesar -0,6166, menyatakan bahwa jika jumlah pajak kendaraan bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar -0,6166 satuan.

- c) Koefisien regresi bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) yang dihasilkan sebesar -0,0243, menunjukkan bahwa jika jumlah bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar -0,0243 satuan.
- d) Koefisien regresi jumlah penduduk (X_3) yang dihasilkan sebesar 4,1434, menunjukkan bahwa jika jumlah bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 4,1434 satuan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) berpengaruh negative terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terutama untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Fungsi dari PKB yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum di dalam suatu daerah. Termasuk untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang baik adalah membayar Pajak Kendaraan Bermotor.⁵²

⁵² Simanjuntak, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 6 Kota Di Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni yang memiliki hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris, Yunilma dan Mukhlizul Hamdi yang memiliki hasil bahwa secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan setiap tahunnya. Dikarenakan jumlah motor di kabupaten Sarolangun besar namun pendapatan BBNKB menyumbang PAD masih kecil. Sehingga meskipun jumlah motor yang beredar di jalan banyak namun besarnya BBNKB tergantung transaksi jual beli motor dan BBNKB tidak memiliki pengaruh PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni yang memiliki hasil bahwa secara parsial Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deden Edwar Yokeu Bernardin yang memiliki hasil bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjon, 1998). Hal ini sejalan dengan teori yang dikeluarkan oleh Simanjutak (2011) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa jumlah penduduk yang meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Makdalena F Asmuruf dkk yang memiliki hasil jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayani yang memiliki hasil bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayani yang memiliki hasil bahwa secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai prob (F-statistic) sebesar 0,036228 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Kemudian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,314132 > 2,76076704$ artinya H_0 diterima dan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sarolangun tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi berganda yang diolah menggunakan Eviews 10 dan Microsoft Excel 2010.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Variabel pajak kendaraan bermotor (X1) secara parsial berpengaruh negative terhadap terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel bea balik nama kendaraan bermotor (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Variabel jumlah penduduk (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
4. Variabel pajak kendaraan bermotor (X1), bea balik nama kendaraan bermotor (X2) dan jumlah penduduk (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Implikasi

Pada penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa implikasi penelitian yang bisa dimanfaatkan, diantaranya:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan implikasi bagaimana pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap pendapatan daerah kabupaten sarolangun tahun 20-2020

2. Implikasi metodologi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, gambaran, serta perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas dengan tema yang sama, namun dengan kondisi objek, variabel serta periode penelitian yang berbeda

3. Implikasi manajemen

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak yang membutuhkan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam manajemen pendapatan asli daerah, karena dengan pengelolaan dan pemutusan kebijakan yang baik akan mampu meningkatkan sumber penerimaan pajak yang lainnya tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akan diperoleh.

C. Saran

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Balik Nama Kendaraan Bermotor karena penerimaan PKB dan BBNKB dan di Kabupaten Sarolangun memiliki pengaruh cukup besar terhadap PAD di Kabupaten Sarolangun dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.

2. Meskipun PKB dan BBNKB tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap PAD, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, pembuatan samsat *on line*, dan juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
3. Bagi penelitian-penelitian lainnya dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi PAD di Kabupaten Sarolangun, Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak daerah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs. An-nisa (4);
59 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995).

Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Qs. Al-Hujarah 49:
15 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995).

A. Buku

Adiwarman Karim, Ekonomi Makto Islam Edisi Ke-3 (Jakarta:Rajawali Pers,
2010).

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi.

A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012).

A.W. Widjaja, otonomi daerah dan daerah otonom,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo
Persada, 2002).

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2006).

Dr, P. “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” CV.
Alfabeta, Bandung, 2008, 25.

Jusuf, Soewadji. “Pengantar Metodologi Penelitian.” Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2012.

Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis
dan Ekonomi (Edisi Keempat).Yogyakarta : Mediakom.

Mardiasmo, perpajakan, (Yogyakarta: Andi offset, 2011).

Matondang, Zulaika, dan Hamni Fadlilah Nasution. Praktik Analisis Data:
Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS. Merdeka Kreasi
Group, 2022.

Rosyidi, Suherman. “Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori
Ekonomi Mikro & Makro.” Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sirajuddin dkk, 2016,”

Sugiyono, Op.Cit, 85.

Uma Sekaran, *Research Methods For Business* (Jakarta : Salemba Empat, 2006).

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2005).

Yani, Ahmad. “Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia,” 2002.

B. Artikel Jurnal

Abdul Qadim Zallun, *Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmii Lialayin*, Cet II,1408 H/ 1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S. dkk, *Sistem Keuangan di Ngara Syariah*,(Bogor: Pustaka Thariq Izzah ,2002), h.138,

Agustina, Ruslinda, dan Rina Arliani. “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012.” *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (2015): 83–101.

Asmuruf, Makdalena. “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 5 (2015).

Badan Pusat Statistik. 2016. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Sarolangun 2016-2020*.

Deden Edwar Yokeu Bernardin / 2017 *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*.

Desti Rinika, Fitri Yani Panggabean. 2014. “Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD”.

Mustika, Sari Tri. 2013. ”Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.

Nimas Galuh Savitri, Ary Yunita Anggraeni/2021 *Analisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur tahun 2013 – 2019*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie/ 2016 Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Pratiwi, Nissa Anggit. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 2 (2019): 105–20.

Rizal, Yani, dan Miftahul Hidayah. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 84–91.

Simanjuntak, Veronika. “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 6 Kota Di Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016,” 2018.

Siti Hayati / 2018 Analisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (pad) menurut perspektif ekonomi islam di provinsi lampung tahun 2011-2016.

Undang-Undang No. 17 pasal 1 butir 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,”

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1,” t.t.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah,”

Lampiran I

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020.

No	Tahun	Bulan	PAD (Y)	PKB	BBNKB	Jumlah Penduduk
1	2016	Januari	7.832.926.143	710.300.200	20.904.000	23.150.205
		Februari	7.160.820.150	790.820.000	0	23.201.105
		Maret	7.263.100.220	780.900.000	0	23.165.231
		April	7.495.391.216	795.000.800	0	23.290.001
		Mei	7.009.000.310	770.100.000	0	23.400.501
		Juni	7.890.213.405	800.050.000	10.557.800	23.350.004
		Juli	7.680.400.000	830.100.250	0	23.600.324
		Agustus	8.100.290.203	805.500.000	0	23.726.301
		September	8.001.190.340	750.800.100	0	24.010.020
		Oktober	7.740.830.260	783.550.050	0	24.294.729
		November	8.250.806.200	810.300.000	40.000.300	24.603.393
		Desember	7.990.209.300	934.360.300	5.603.800	24.405.186
2	2017	Januari	5.200.310.000	1.203.274.600	50.216.200	23.904.000
		Februari	5.900.390.210	1.436.599.000	0	23.993.200
		Maret	6.980.210.400	1.488.009.200	0	23.807.329
		April	6.150.290.410	1.753.569.200	0	23.580.446
		Mei	8.246.319.200	981.033.600	11.714.000	24.400.380
		Juni	7.329.201.400	962.469.500	14.643.600	24.530.002
		Juli	9.293.400.250	1.197.397.150	9.517.000	24.329.803
		Agustus	7.246.300.210	1.179.556.300	18.843.800	24.150.250
		September	8.100.310.400	1.022.363.400	11.092.000	24.110.001
		Oktober	7.210.820.100	1.176.475.700	18.103.900	24.050.249
		November	5.098.250.805	1.172.134.100	12.289.800	24.250.083
		Desember	8.429.326.229	1.078.634.300	34.696.600	24.325.257
3	2018	Januari	9.280.382.820	1.499.546.800	0	23.394.000
		Februari	7.901.300.400	1.165.272.300	9.553.000	24.954.325
		Maret	8.820.800.100	1.330.700.200	3.200.000	23.821.400
		April	9.140.801.250	1.301.267.500	0	24.501.800
		Mei	10.400.200.000	1.284.899.200	0	24.900.428
		Juni	10.150.250.901	1.565.382.800	0	24.692.300
		Juli	12.450.200.000	1.051.968.200	6.710.000	24.542.200
		Agustus	11.310.405.900	1.150.157.200	17.060.000	24.184.329
		September	8.409.821.300	1.048.887.800	15.685.800	24.130.281
		Oktober	9.100.910.005	1.146.168.700	38.448.700	25.232.905
		November	8.432.828.332	1.211.085.300	5.103.000	25.681.232
		Desember	13.430.692.864	1.222.270.400	16.353.700	25.949.800

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

4	2019	Januari	7.901.300.290	1.259.346.600	1.468.000	24.100.240
		Februari	7.310.000.000	1.055.439.100	3.500.000	24.400.314
		Maret	8.210.300.410	1.390.944.400	0	24.562.329
		April	8.843.150.000	1.320.271.300	0	24.809.000
		Mei	6.006.359.402	1.391.154.300	0	25.050.710
		Juni	5.402.800.392	1.011.878.000	0	25.423.003
		Juli	7.382.495.000	1.503.951.900	0	25.200.000
		Agustus	8.239.841.150	1.474.750.500	0	25.521.019
		September	9.103.398.210	1.569.324.700	0	25.094.764
		Oktober	9.208.318.300	1.332.416.100	11.026.000	25.596.400
		November	9.916.800.150	1.301.338.700	34.995.000	26.000.020
		Desember	7.056.602.677	1.448.073.800	18.318.700	26.150.201
5	2020	Januari	4.029.206.100	1.595.870.800	3.400.000	23.380.000
		Februari	4.800.902.350	1.452.834.900	0	23.532.500
		Maret	5.416.300.950	1.027.600.300	0	24.150.000
		April	3.290.400.100	1.594.773.000	0	24.500.500
		Mei	5.490.905.800	1.067.005.500	0	24.889.340
		Juni	6.950.002.059	1.944.404.100	0	24.694.699
		Juli	7.416.981.000	1.452.575.100	6.324.000	24.900.000
		Agustus	8.000.319.984	1.427.104.450	0	24.695.309
		September	7.491.129.000	1.474.516.900	0	25.237.847
		Oktober	5.000.800.912	1.264.829.300	0	25.321.806
		November	5.418.200.000	2.149.192.500	0	25.841.403
		Desember	6.793.658.728	1.264.034.800	5.464.000	25.903.296

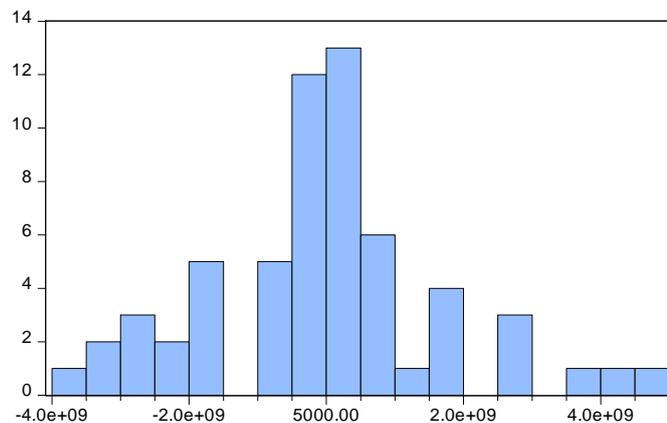
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran II

Hasil Uji Normalitas

1. Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1 60	
Observations 60	
Mean	5.48e-07
Median	12887050
Maximum	4.63e+09
Minimum	-3.69e+09
Std. Dev.	1.73e+09
Skewness	0.378765
Kurtosis	3.567159
Jarque-Bera	2.238806
Probability	0.326475

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Uji Multikolinearitas

	PKB	BBNKB	Jumlah_Penduduk
PKB	1.000000	-0.215543	0.405688
BBNKB	-0.215543	1.000000	0.115232
Jumlah_Penduduk	0.405688	0.115232	1.000000

3. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Least Squares
Date: 01/22/23 Time: 17:49
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.76E+09	5.13E+09	-1.123659	0.2660
PKB	0.668448	0.585145	1.142364	0.2582
BBNKB	0.361599	14.02910	0.025775	0.9795
JUMLAH_PENDUDUK	252.1124	221.4993	1.138208	0.2599
R-squared	0.077237	Mean dependent var		1.22E+09
Adjusted R-squared	0.027803	S.D. dependent var		1.22E+09
S.E. of regression	1.20E+09	Akaike info criterion		44.71341
Sum squared resid	8.06E+19	Schwarz criterion		44.85303
Log likelihood	-1337.402	Hannan-Quinn criter.		44.76802
F-statistic	1.562438	Durbin-Watson stat		1.634697
Prob(F-statistic)	0.208656			

Lampiran III

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: LOGPAD__Y_

Method: Least Squares

Date: 04/07/23 Time: 10:58

Sample: 1 60

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

2. Uji Parsial

Dependent Variable: LOGPAD__Y_

Method: Least Squares

Date: 04/07/23 Time: 10:58

Sample: 1 60

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

3. Uji Simultan

Dependent Variable: LOGPAD__Y_
Method: Least Squares
Date: 04/07/23 Time: 10:58
Sample: 1 60
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOGPAD__Y_
Method: Least Squares
Date: 04/07/23 Time: 10:58
Sample: 1 60
Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-34.45759	22.02330	-1.564597	0.1302
LOGPKB	-0.616695	0.268979	-2.292727	0.0306
LOGBBNKB	-0.024313	0.052390	-0.464079	0.6466
LOGJUMLAH_PENDUDUK	4.143456	1.428951	2.899648	0.0077
R-squared	0.284537	Mean dependent var		22.79905
Adjusted R-squared	0.198681	S.D. dependent var		0.242943
S.E. of regression	0.217474	Akaike info criterion		-0.086031
Sum squared resid	1.182376	Schwarz criterion		0.102562
Log likelihood	5.247449	Hannan-Quinn criter.		-0.026966
F-statistic	3.314132	Durbin-Watson stat		1.541089
Prob(F-statistic)	0.036228			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Wage Suratman
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Bedorong, 24 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 175 cm
Berat Badan : 75 kg
Alamat : Ds. Sei Binjai, RT. 01 Desa Lubuk Bedorong, Kec.
Limun, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi
No Hp : 085379789118
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Email : suratmanwage562@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 34/VII Lubuk Bedorong
SMP : SMPN Satu Atap 1 Sarolangun
SMA : SMAN 7 Sarolangun
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jurusan Akuntansi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Motto Hidup : Keberhasilan dan kesuksesan tidak akan bertahan lama jika anda memperolehnya melalui jalan pintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi